

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi kepada daerah melalui asas desentralisasi (pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU RI No 22 TAHUN 1999)) mendorong lebih banyak peran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya karena kewenangan yang di titik beratkan dimiliki pemerintah daerah. Desentralisasi pendidikan nasional dibangun diatas paradigma otonomi daerah karena orang daerahlah yang lebih mengetahui pengelolaan satuan pendidikan dan potensi-potensi daerahnya (H. Sanuasi Uwes Dan Rusdiana, 2017). Dengan adanya desentralisasi tersebut untuk itu kemandirian suatu daerah harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah agar mendapatkan gambaran yang nyata tentang kondisi daerah, sehingga dapat menyusun strategi yang matang agar masyarakat yang berada didaerah tersebut berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif. Kemudian revisi undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang UU No. 32 tahun 2004 dan sekarang menjadi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (U. tentang pemerintah daerah Nasional, 2014).

Indonesia kaya akan potensi dan setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing yang dapat di tonjolkan, sebagai contoh suatu daerah adalah potensi Provinsi Bali dengan wisatanya dan Nusa Tenggara Barat dengan wisata syariahnya. Potensi lokal tersebut akan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Pengelolaan potensi dan kekhasan daerah ini sangat bergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan urusan wajib pemerintah bidang pendidikan. Kewenangan Pemerintah Provinsi yang dimaksud meliputi:

1. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;

4. Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.

Salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan ialah mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal inilah yang menjadi dasar pengelolaan pendidikan pada tingkat SMA dan SMK merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

Kurikulum adalah suatu wujud pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut salah satu kewenangan pendidikan yang dapat didesentralisasikan. Pendidikan melalui kurikulum dapat bebas dikembangkan suatu daerah, untuk itu hal ini adalah kesempatan suatu daerah untuk mengembangkan potensinya (Hidayat, 2016). Saat ini potensi lokal daerah yang diperkenalkan dalam kurikulum baru sebatas pengetahuan tentang bahasa daerah maupun seni budaya setempat. Padahal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sebenarnya lebih dari itu. Potensi dibidang pertanian, obat tradisional, pertambangan serta pariwisata sejatinya merupakan modal dasar yang sangat berharga untuk kemudian dikembangkan agar mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini dunia pendidikan berperan penting dalam menyiapkan SDM yang mampu membangun daerahnya. Kurikulum sejatinya mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan operasional tujuan yang hendak dicapai. Kurikulum disusun oleh para ahli dilandasi dengan filsafat, nilai-nilai, pengetahuan dan perbuatan pendidikan. Kurikulum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebuah institusi pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab permasalahan di masa depan. Kurikulum adalah suatu rancangan pendidikan yang merangkum pengalaman-pengalaman belajar siswa di dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan.

Jika dikaitkan dengan potensi lokal Kalimantan Tengah, memasukkan kurikulum Muatan Lokal Kalimantan tidak hanya dibidang Bahasa Dayak, seni budaya (tari, lagu, adat istiadat), tetapi juga potensi di bidang kearifan lokal seperti bercocok tanam, gaya hidup, obat-obatan tradisional serta masih banyak lagi potensi yang sejatinya bisa di masukkan dalam kurikulum muatan lokal. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum lokal ini adalah kurikulum muatan lokal yang merupakan "kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan dalam mata pelajaran yang ada". Dengan kata lain substansi muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Dalam penyelenggaraan pendidikanpun mengisyaratkan pentingnya Muatan

Lokal kedaerahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Menteri Pendidikan Nasional, 2000) tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain berisi pesan bahwa kurikulum memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan (Pasal 36, ayat 3) (U. S. P. Nasional, 2003). Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem Pendidikan berupa kurikulum yang diatur oleh pemerintah untuk setiap jenjang pendidikan formal. Dengan adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik akan menghasilkan Pendidikan yang berkualitas. Idealitas untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berakar pada keragaman kearifan lokal belum mendapat perhatian memadai dari berbagai kalangan. Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kurikulum. Dalam sejarah pendidikan Indonesia khususnya mengenai kurikulum Muatan Lokal, mengharuskan setiap sekolah memasukan 20% waktu pada proses pembelajarannya berdasarkan kelokalan yang ada disekitar sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung desentralisasi pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah (Bjork, 2004)

Keinginan masyarakat Dayak untuk menerapkan kurikulum muatan lokal sudah ada sejak dikeluarkannya payung hukum Pergub No 22 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal Provinsi Kalimantan Tengah (*PERGUB 22 TAHUN 2011.Pdf*, n.d.) tersebut namun terbentur dalam persoalan bahan yang akan diajarkan dalam materi kurikulum muatan lokal serta sumberdaya manusia atau guru yang akan mengajarkan kurikulum muatan lokal itu sendiri. Berfondasikan kepada perihal tersebut pihak pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tidak memaksakan kurikulum muatan lokal diajarkan kepada anak didik. Kotim (Kotawaringin Timur) sudah menyusun buku mulok sejak tahun 2017 lalu, pada tahun 2018 sudah dicetak dan didistribuksikan kepada masing-masing guru SD dan SMP Kotim mengeluarkan buku muatan lokal aplikasi buku muatan mulok untuk SD dan SMP di Kotim Provinsi Kalteng (*Buku Materi Muatan Lokal Karya Pemda Kotim Mulai Diterapkan – BeritaKalteng*, n.d.) ini, dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng No 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal (*PERGUB 22 TAHUN 2011.Pdf*, n.d.) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (*Permendikbud No 79 Tahun 2014*, 2014). Buku mulok tersebut berisi 12 kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalteng, yakni bahasa dan sastra daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat dan hukum adat, sejarah lokal, teknologi lokal, lingkungan alam, obat-obatan tradisional, masakan tradisional, busana tradisional, olah raga tradisional dan nilai budaya lokal dalam prespektif global. Penguatan

kompetensi dan keterampilan (*skill*) peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal hal itu juga sebagaimana adanya Perda Provinsi Kalteng No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (*Perda Prov No 10 Tahun 2012, 2012*).

Dampak dari globalisasi tentu tidak semua berdampak positif, implikasi dari efek globalisasi menimbulkan masalah bagi kebudayaan, sehingga kebanyakan dari generasi muda meninggalkan nilai-nilai budaya yang dulu selalu diterapkan di dalam kehidupan, sehingga generasi muda kehilangan jati dirinya, terbuai dengan infiltrasi budaya barat yang jauh dari norma-norma adat ketimuran. Padahal, budaya daerah, seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, senjata, makanan, dan lainnya merupakan kekayaan asli Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan dan dipelihara sebagai bagian dari identitas nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, kepedulian terhadap kekayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Era Globalisasi membawa dampak bagi perkembangan budaya di Indonesia. Kebudayaan global masuk secara cepat ke wilayah Indonesia melalui media massa dan teknologi informasi. Arus kebudayaan yang tidak terbandung ini berhadapan dengan nilai-nilai luhur budaya sehingga mengalami proses asosiasi, asimilasi dan akulturasi. Banyak masyarakat Indonesia lebih mengenal kebudayaan bangsa asing dari pada budaya lokal seperti gaya pakaian, berbicara, bahasa, musik, dan lain sebagainya. Hal ini semakin menjadikan bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya. Dampak globalisasi lainnya yaitu semakin lunturnya keberadaan kebudayaan di kalangan masyarakat. Banyak perilaku masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam sila Pancasila. Berbagai tindakan kriminal, kejahatan, ketidakjujuran, dan ketidaksopanaan dalam berperilaku mewarnai karakter masyarakat Indonesia yang jauh dari moral bangsa. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang mempersingkat interaksi antar wilayah satu dengan yang lainnya membawa pengaruh asing yang masuk ke Indonesia, cepat nya arus globalisasi ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, dimana akibat negatif yang terjadi adalah tergerusnya nilai-nilai moral dan karakter (Sinulingga et al., n.d.)

Selain itu melewati kebudayaan orang Dayak sangat tau bagaimana menjaga lingkungan atau merawat hutannya melewati pengetahuan yang diturunkan turun temurun, apalagi fenomena saat ini kualitas lingkungan yang menurun terkait perilaku manusia memperlakukan alam, untuk itu diperlukan peran dari pemerintah dalam mengelola kebijakan-kebijakannya yang mengarah kepada pelestarian kebudayaan dan didalam dunia pendidikan ditanamkan semenjak dini nilai-nilai kebudayaan daerah yang positif. Keberadaan kurikulum muatan lokal bahkan mengalami disorientasi dengan

berkembangnya praktik yang cenderung mengabaikan realitas sosial budaya dimana pendidikan tersebut berlangsung. Maka melalui kebijakan pendidikan yang telah terdesentralisasi, institusi pendidikan diberikan kewenangan untuk mengembangkan pendidikan sesuai kekhasan daerah masing-masing (*local genius*). Sehingga pendidikan nasional bertumpu pada kekhasan lokal daerah akan mampu membentuk manusia yang berintegritas tinggi dan berkarakter. Sehingga mampu melahirkan anak-anak bangsa yang hebat dan bermartabat sesuai dengan spirit pendidikan yaitu memanusiakan manusia.

Pemindahan ibukota baru di Kalimantan (Republik, 2022) dan program lumbung pangan nasional atau *Food Estate* (*Setda Prov Kalteng - Kuatkan Upaya Wujudkan Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Kalteng Tinjau Kembali Lahan Food Estate Di Desa Belanti Siam, n.d.*) mengakibatkan adanya perpindahan manusia dari luar Kalimantan masuk ke Kalimantan secara besar-besaran, hal ini tentu saja memberikan konsekuensi terhadap kehidupan sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi setempat (Fisip UI, 2020). Banyak perdebatan menarik tentang pemindahan ibukota dan program Nasional *Food Estate* (*Jangan Lupakan Aspek Sosial-Budaya Saat Pindah Ibu Kota - ANTARA News, n.d.*), salah satunya dampaknya berupa terkikisnya budaya setempat beserta nilai-nilainya hal ini menjadi keresahan sendiri bagi masyarakat lokal yang ingin tetap mempertahankan adat istiadat dan budayanya (*Harapan Masyarakat Adat Kalteng Terhadap Ibu Kota Baru - ANTARA News, n.d.*). Efek dari gelombang urbanisasi besar-besaran terhadap program tersebut untuk Kalimantan akan memberikan dampak yang harus dipikirkan bersama (*Lemhannas RI Selenggarakan Roundtable Discussion Mengenai Antisipasi Dampak Urbanisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan Dan Perkotaan, n.d.*) hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap sosial dan budaya dan berujung pada konflik dan runtuhnya nilai-nilai kebudayaan serta adat istiadat.

Nilai-nilai yang ada dalam Muatan Lokal sangat diperlukan untuk melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berguna bagi diri sendiri, orang lain hingga lingkungan sekitar sehingga dapat menunjang pembangunan baik berskala lokal, regional, nasional bahkan internasional. Nilai-nilai dari kearifan lokal yang tertanam di Suku Dayak bersifat bijaksana, bernilai baik sehingga dipandang perlu dipertahankan atau ditanam kuat untuk lintas generasi di dalam masyarakat contohnya :

1. Suku Dayak memiliki falsafah “ *Huma Betang* “ , yaitu menjunjung tinggi toleransi antar umat,

2. Konsep kesetaraan gender, suku Dayak Kalimantan Tengah tidak mengenal budaya patriaki, perempuan Dayak dikenal bukan insan yang lemah. Salah satu konsep kesetaraan gender dalam tradisi perempuan Dayak adalah, dirinya harus mampu berperan sebagai “*Balian*”. “*Balian*” adalah perempuan yang memiliki tugas sebagai mediator dan komunikator antara manusia dengan makhluk lainnya (roh) yang keberadaannya tidak terlihat kasat mata, seorang “*Balian*” sangat dihargai di tengah masyarakat karena informasi nya bagi kepentingan masyarakat tradisi Dayak,

3. Perempuan yang dipingit sejak remaja (*Bawi Kuwu*), seorang Bawi kuwu dipersiapkan kamar khusus yang berada diatas kamar orang tua atau disamping orang tua. Selama menjadi Bawi Kuwu ( 2-3 tahun) sang gadis tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain hanya boleh ditemani seorang wanita tua yang di hormati untuk diajarkan hak dan kewajiban wanita Dayak, dan dibimbing memasuki alam bawah roh atau mengalami pembaharuan spiritual, serta diajarkan berbagai keahlian seperti menenun, menganyam dan merawat diri dari ujung rambut sampai ujung kaki selain itu juga belajar hukum-hukum suku Dayak. selain itu seorang wanita Dayak diarahkan memiliki sikap waspada tingkat tinggi, baik dalam perilaku , ucapan maupun janji,

4. Semboyan hidup “*Isen Mulang*” baik laki-laki maupun perempuan Dayak yaitu tidak boleh pantang menyerah.

Masih banyak lagi nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang harus dipertahankan, salah satu upaya untuk menjaga nilai-nilai kelokalan tersebut dengan memperkenalkannya kepada generasi dan kaum pembelajar melewati kurikulum muatan lokal agar dapat dan terus dipelajari sehingga kearifan lokal dapat terus terjaga.

Belum lagi jumlah suku dayak pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk hanya berjumlah 3.009.494 atau 1,27 % dari jumlah penduduk Indonesia, dengan peringkat 12 dari jumlah penduduk yang ada Indonesia (BPS, 2019). Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, dengan kemajuan zaman daerah ini pun menjadi pilihan untuk mencari rezeki sehingga berangsur-angsur kota Palangka Raya mulai di padati penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah per tahun 2010-2020 sejumlah 1,84%, meningkat dibandingkan periode 2000-2010 sejumlah 1,79% (*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah*, n.d.). Palangka Raya mulai dipadati oleh multi etnis, seiring dengan perubahan tersebut kerap pembangunan di Kota Palangka Raya semakin menampilkan kesan modern dan meninggalkan ornament-ornamen bernuansa Dayak tidak seperti daerah-daerah lain yang menunjukkan identitas kelokalannya seperti Bali, DKI Yogyakarta, dll. Berdasarkan observasi

penulis penggunaan bahasa “ibu” di kalangan anak muda mulai terkikisnya penggunaan Bahasa “ibu” tersebut karena berbagai faktor (Budhiono, 2009)

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Berdasarkan Suku Tahun

2000

**Ethnic Groups of Indonesian Citizens:  
Central Kalimantan, 2000**

No.	Ethnic Group	Number	Percentage
1	Banjarese	435,758	24.20
2	Javanese	325,160	18.06
3	Ngaju	324,504	18.02
4	Others	204,372	11.35
5	Dayak Sampit	172,252	9.57
6	Bakumpai	135,297	7.51
7	Madurese	62,228	3.46
8	Katingan	60,171	3.34
9	Maanyan	50,505	2.80
10	Sundanese	24,479	1.36
11	Buginese	3,994	0.22
12	Betawi	864	0.05
13	Minangkabau	652	0.04
14	Bantenese	477	0.03
TOTAL		1,800,713	100.00

Suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Tengah terdiri atas Dayak Hulu dan Dayak Hilir. Dayak Hulu terdiri atas : Dayak Ot Danum, Dayak Siang, Dayak Murung, Dayak Taboyan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun dan Dayak Maanyan. Sedangkan Dayak Hilir (Rumpun Ngaju) terdiri atas: Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Katingan, dan Dayak Sampit. Suku Dayak yang dominan di Kalimantan Tengah adalah suku Dayak Ngaju, suku lainnya yang tinggal di pesisir adalah Banjar Melayu Pantai merupakan ¼ populasi Kalteng. Disamping itu ada pula suku Jawa, Madura, Bugis dan lain-lain. Gabungan suku Dayak (Ngaju, Sampit, Maanyan, Bakumpai) mencapai 37,90%. Terjadinya perkawinan campur antar suku dayak dengan suku lain mengakibatkan adanya asimilasi budaya.

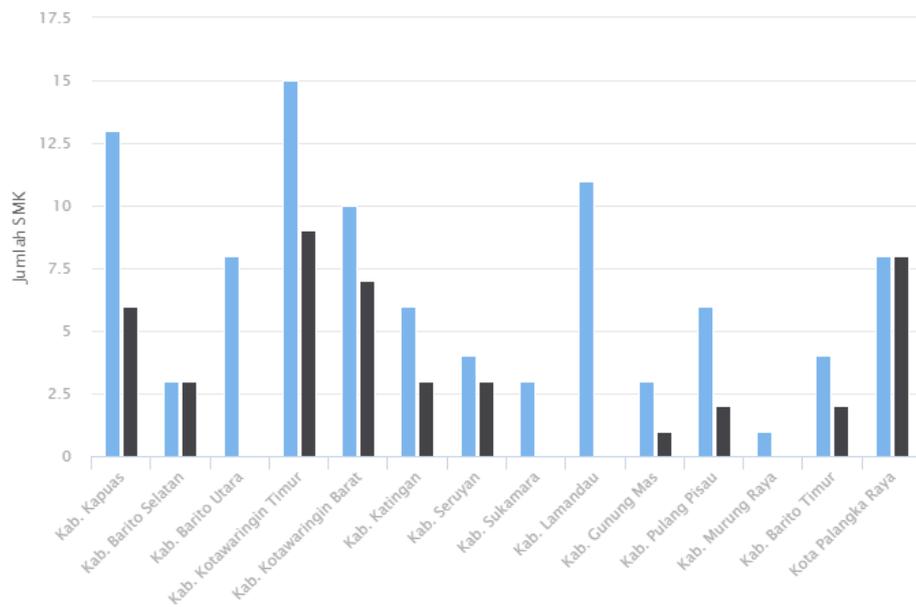
Dalam penggunaan bahasa daerah keberadaan bahasa Dayak di Kalimantan Tengah terancam punah dalam kurun waktu 20-30 tahun mendatang. Hal itu dikatakan Hery Budhiono dari Balai Bahasa Kalteng pada Selasa, 26 November 2019 di Media Indonesia dan pada November 2021 UNESCO telah merilis daftar bahasa di dunia yang terancam punah, salah satunya Bahasa Suku Dayak (*Keberadaan Bahasa Dayak Terancam Punah*, n.d.). Budaya Dayak kerap tidak dipakai dalam membangun kultur etika dalam

kehidupan sehari-hari khususnya pendidikan, kurangnya porsi kurikulum muatan lokal, dalam hal ini bahasa daerah, adalah akibat kebijakan pemuliaan bahasa daerah yang setengah-setengah dan tanggung dalam hal ini (Budhiono, 2009).

Pendidikan mengikuti irama kemajuan zaman dan hendaknya tidak melupakan budaya lokalnya sebagai identitas diri, ruang pendidikan diharapkan dapat mengakomodasi kelokalan daerah sehingga pelajar tetap dapat melestarikan budayanya bahkan memerankan pembudaya sebagai jati diri bangsa. Melihat fenomena globalisasi yang berdampak pada keberadaan identitas budaya lokal, maka diperlukan sebuah paradigma pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasis pada *local genius* (kearifan lokal) sebagai upaya proteksi terhadap keberadaan identitas lokal. Salah satu cara agar kultur atau budaya dapat dilestarikan dengan baik ialah melalui Pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam melestarikan budaya tradisional dan sebagai faktor pembangunan (Of et al., 1983). Penguatan tentang muatan lokal di dalam kurikulum muatan lokal sangat dibutuhkan dalam pendidikan.

Angka pengangguran di Kalimantan Tengah meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2019 sebesar 56.790 orang, tahun 2020 sebesar 63.309 orang dan tahun 2021 sebesar 63.874 orang (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, n.d.) data tersebut menggambarkan bahwa mutu lulusan di Kalimantan Tengah masih belum memenuhi tuntutan dunia kerja dan salah satu lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi keahlian profesional adalah pendidikan kejuruan. Berdasarkan data *dashboard* jumlah SMK (Datapokok.ditpsmk, 2018) di Kalteng, jumlah sekolah SMK adalah sebagai berikut:

*Intelligentia - Dignitas*



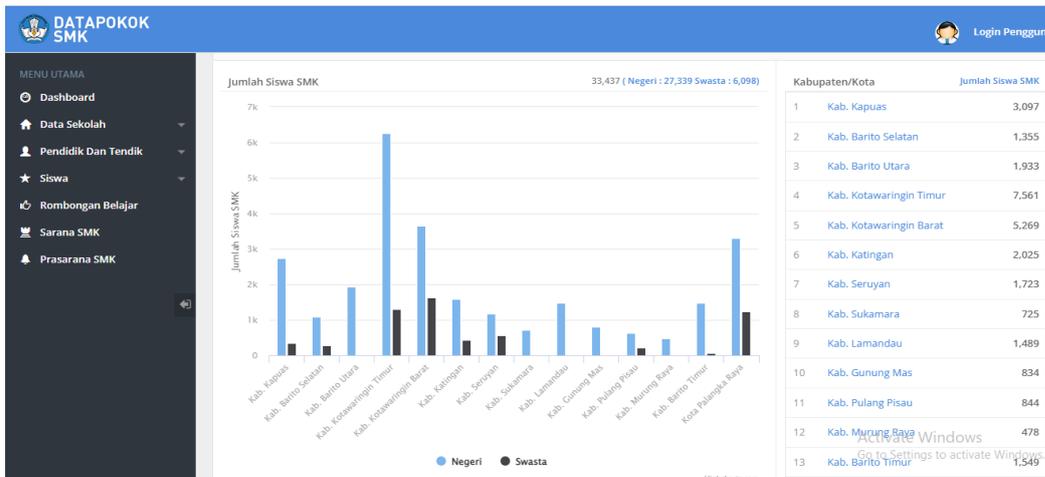
Gambar 1. 1 Jumlah SMK di Kalimantan Tengah 2018

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, terdapat 139 sekolah SMK yang terbagi dalam 95 SMK Negeri dan 44 SMK Swasta : 44 dengan jumlah sebaran :

Tabel 1. 2 Jumlah Sebaran SMK di Kalimantan Tengah

No	Kabupaten / Kota	Jumlah SMK
1.	Kabupaten Barito Selatan	6
2.	Kabupaten Barito Timur	6
3.	Kabupaten Barito Utara	8
4.	Kabupaten Gunung Mas	4
5.	Kabupaten Kapuas	19
6.	Kabupaten Katingan	9
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	17
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	24
9.	Kabupaten Lamandau	11
10.	Kabupaten Murung Raya	1
11.	Kabupaten Pulang Pisau	8
12.	Kabupaten Sukamara	3
13.	Kabupaten Seruyan	7
14.	Kota Palangka Raya	16

Berdasarkan Dapodik SMK, data jumlah siswa SMK di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Jumlah Siswa SMK di Provinsi Kalimantan Tengah 2022

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, didapatkan sebanyak 33,437 siswa SMK di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan 26.339 siswa dari SMK Negeri dan 6.098 siswa dari SMK Swasta.

Kekayaan potensi lokal bisa menjadi aset penting bagi suatu daerah, apabila potensi tersebut dimaksimalkan maka dapat menjadi peluang bagi siswa SMK untuk berkarya dan berinovasi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta siswa SMK dapat berdaya saing global, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan mensejahterakan rakyat.

Penyeleksian dan penetapan sekolah untuk dijadikan tempat penelitian dilakukan observasi dan analisis terhadap program-program budaya yang dimiliki dari masing-masing sekolah berdasarkan 12 muatan lokal yang terdapat dalam Pergub No 22 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal provinsi Kalimantan Tengah., SMKN 3 dipilih untuk menjadi tempat penelitian karena di SMK ini terdapat kompetensi keahlian/jurusan berupa : perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut, teknik komputer dan jaringan, usaha perjalanan wisata, selain itu SMKN 3 telah menghasilkan peroduk-produk yang mengandung nilai kelokalan seperti membuat jaket dengan benang bintang (*Jaket Dare Talawang Karya SMK Palangka Raya Menembus Eropa* - ANTARA News, n.d.)

Sedangkan pada SMKN 4 terdapat beberapa jurusan diantaranya multi media, desain dan produksi kriya kayu, desain dan produksi kriya tekstil dan geologi pertambangan. SMKN 4 adalah SMK Industri dan merupakan satu-satunya SMK yang

memiliki jurusan keahlian membuat khas batik Kalteng yang dinamakan Desain Kria Tekstil (diskominfo kalteng, n.d.)

Berdasarkan hasil pengamatan awal di beberapa SMK tersebut diketahui kendala antara lain: belum diterapkannya kurikulum muatan lokal dengan baik, yaitu: tidak ada mata pelajaran muatan lokal di dalam Dapodik sehingga guru-guru enggan mengajar muatan lokal. Belum maksimalnya sekolah menerapkan Pergub No 22 tahun 2011 ditemui permasalahan seperti tidak tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk guru muatan lokal, karena dari semua universitas yang ada di Kalimantan Tengah baik negeri maupun swasta tidak terdapat program studi pendidikan muatan lokal, sehingga ketersediaan SDM yang menguasai muatan lokal sangatlah terbatas bahkan langka, kemungkinan masih banyak faktor lain yang melatar belakangi permasalahan –permasalahan dalam melaksanakan kurikulum muatan lokal tersebut, sehingga perlu dikaji sejauh mana implementasi dari kebijakan Pergub No. 22 Tahun 2011 dapat berjalan secara efektif.

Secara konteks penelitian ini menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat terutama di lembaga pendidikan tentang realisasi muatan lokal dari Pergub Provinsi Kalteng No. 22 tahun 2011 dapat meningkatkan keterampilan siswa berbasis kearifan lokal pada siswa SMK Kota Palangka Raya. Kemudian fokus penelitian pada pengelolaan/manajemen tatacara pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada tingkat sekolah dan pengelolaan yang menjadi tujuan yakni diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi dan kepala sekolah, serta pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah. Sehingga lebih terlihat usaha pemerintah daerah dan lembaga terkait serta sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dalam perspektif implementasi dari Pergub No 22 tahun 2011 tentang kurikulum muatan lokal yang telah dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Kota Palangka Raya.

Melihat apa yang dijelaskan di atas maka implementasi dari kebijakan kurikulum Pergub No. 22 Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Tengah harus dikelola lebih optimal, diawali dengan langkah mengevaluasi kurikulum muatan lokal sebagai suatu kebijakan Pergub No. 22 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itulah berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“Evaluasi Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di SMKN 3 Palangka Raya dan SMKN 4 Palangka Raya”**

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah di uraikan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan penelitian. Adapun pembatasan ini di fokuskan pada aspek waktu, tempat dan konteks penelitian. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dan fokus dalam penelitian. Penelitian ini merupakan deskripsi secara mendalam tentang evaluasi implementasi Pergub No. 22 Tahun 2011 dalam meningkatkan keterampilan berbasis kearifan lokal pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (SMKN 3 dan SMKN 4 Palangka Raya).

Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2022-2023, dimana kebijakan tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal telah di tetapkan sejak 2011 dan tidak ada perubahan atas kebijakan tersebut. Sedangkan dari tempat penelitian, peneliti menggunakan wilayah yang di fokuskan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di Kota Palangka Raya. Penelitian akan terfokus pada dua tempat yaitu SMKN 3, dan SMKN4 yang ada di Kota Palangka Raya.

Sedangkan secara konteks penelitian ini menjelaskan bagaimana fenomena yang ada masyarakat tentang realisasi dari Pergub No 22 Tahun 2011. Kemudian di fokuskan terkait tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal di SMK. Pengelolaan yang menjadi tujuan penelitian yakni diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan kepala sekolah serta pengembangan kurikulum muatan lokal disekolah. Sehingga terlihat adanya peningkatan keterampilan siswa SMK berbasis kearifan lokal dalam persfektif implementasi dari tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

Berdasarkan latar belakang, batasan yang sudah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam meningkatkan keterampilan berbasis kearifan lokal pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, adapun sub fokus penelitian yaitu:

1. *Context*, meliputi landasan hukum, tujuan dan sasaran yang sesuai untuk implementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya;
2. *Input*, meliputi , persiapan, kurikulum, sumber daya manusia ( SDM), sarana dan prasarana, dukungan dana operasional pada impelementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Kota Palangka Raya,

3. *Process*, meliputi perencanaan dan sosialisasi kurikulum mulok, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dari implementasi kurikulum mulok di SMK3 dan SMK 4 Palangka Raya,
4. *Product*, hasil capaian tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kurikulum muatan lokal Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan keterampilan berbasis kearifan lokal pada implementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya
5. *Outcome* atau hasil keterserapan lulusan SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya di dunia kerja.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka kita mendapatkan gambaran mengapa penelitian ini dilakukan, pelaksanaan kurikulum muatan lokal perlu di tinjau ulang apakah kurikulum muatan lokal ini dapat menjadi alternatif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memenuhi harapan sosio-budaya masyarakat, tata kelola pelaksanaan kurikulum muatan local yang telah berlangsung tersebut di analisis, kemudian hasil analisis tersebut dapat menjadi input permasalahan untuk membuat model kebijakan peraturan daerah tentang pendidikan berbasis kebudayaan, sehingga menghasilkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *Context*, meliputi landasan hukum, tujuan dan sasaran yang sesuai untuk implementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya?
2. Bagaimanakah *Input*, meliputi persiapan, kurikulum, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dukungan dana operasional pada implemmentasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Kota Palangka Raya)?
3. Bagaimanakah *Process*, meliputi perencanaan dan sosialisasi kurikulum mulok, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dari implementasi kurikulum mulok di SMK3 dan SMK 4 Palangka Raya?
4. Bagaimana *Product*, hasil capaian tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kurikulum muatan lokal Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan keterampilan berbasis kearifan lokal pada implementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya?
5. Bagaimana *Outcome* atau hasil keterserapan lulusan SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya di dunia kerja?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) tujuan yakni tujuan umum dan khusus, sebagai berikut:

### 5. Tujuan Umum

. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka fokus penelitian ini adalah evaluasi kurikulum muatan lokal SMK di Kota Palangka Raya

### 6. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian untuk menganalisis:

- a. *Context*, meliputi landasan hukum, tujuan dan sasaran yang sesuai untuk implementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya,
- b. *Input*, meliputi , persiapan, kurikulum, sumber daya manusia ( SDM) , sarana dan prasarana, dukungan dana operasional pada implelementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Kota Palangka Raya,
- c. *Process*, meliputi perencanaan dan sosialisasi kurikulum mulok, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dari implementasi kurikulum mulok di SMK3 dan SMK 4 Palangka Raya,
- d. *Product*, hasil capaian tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kurikulum muatan lokal Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan keterampilan berbasis kearifan lokal pada implementasi kurikulum muatan lokal di SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya,
- e. *Outcome* atau hasil keterserapan lulusan SMK 3 dan SMK 4 Palangka Raya di dunia kerja.

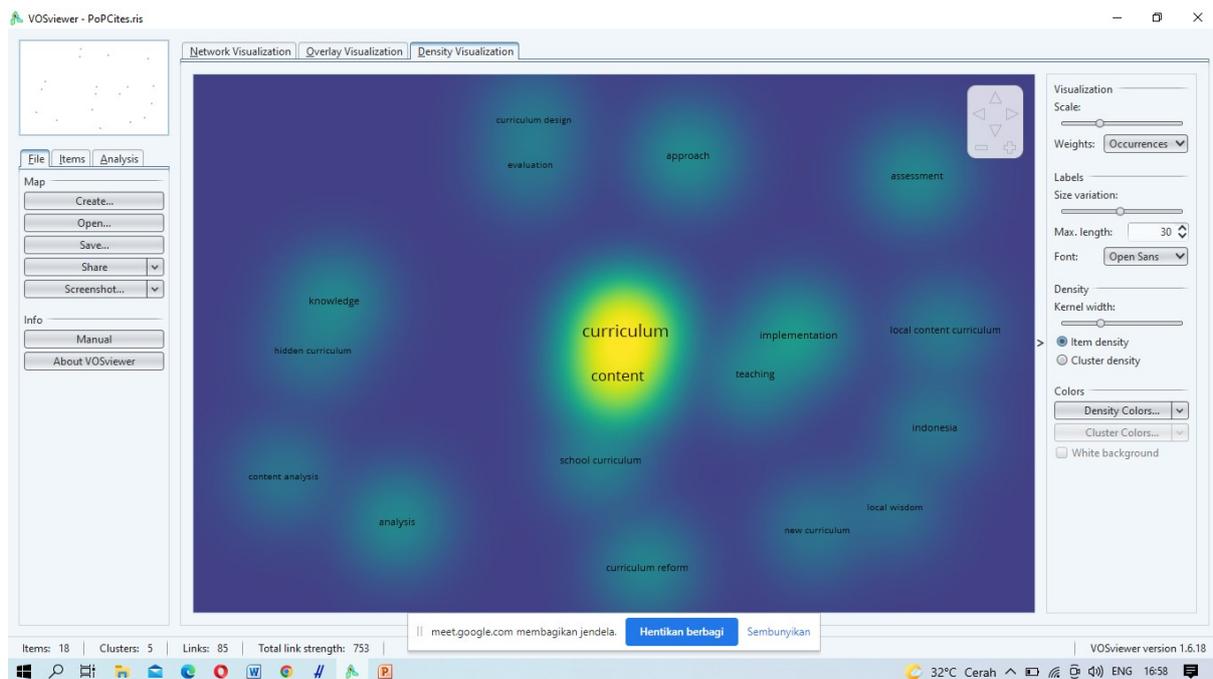
## 1.5 State of the Art /Kebaharuan Penelitian

Penelitian tentang kurikulum muatan lokal relatif telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada tentang pendidikan berbasis budaya dapat disampaikan pada Lampiran 1:

Penelitian ini akan menggali bagaimana pengelolaan dan penyelenggaran pelaksanaan pendidikan kurikulum muatan lokal dalam meningkatkan keterampilan berbasis kearifan lokal pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (SMKN 3 dan SMKN 4 Palangka Raya).

Bentuk kebaruan dalam penelitian adalah aspek model evaluasi penelitian dalam melaksanakan kurikulum muatan lokal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian





Gambar 1. 5 Analisis Pemetaan Bibliometrik 3

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terlihat memiliki kesamaan tentang evaluasi kurikulum muatan lokal, namun yang membedakan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya hanya dilakukan di satuan pendidikan secara parsial.
2. Penelitian yang pernah dilakukan hanya dalam aspek implementatif dari pendidikan berbasis budaya dan dibatasi oleh wilayah pemahaman siswa saja.

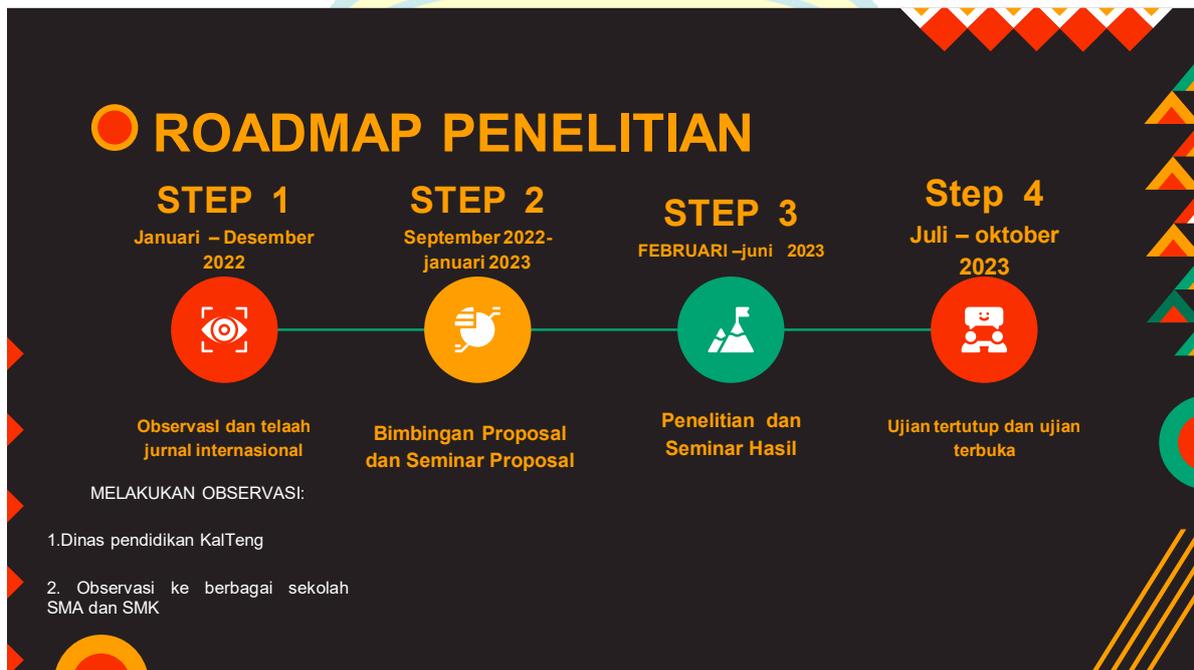
Penelitian ini akan mengevaluasi kurikulum muatan lokal sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu kurikulum muatan lokal SMK di Kota Palangka. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis hambatan dan usaha sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Diharapkan dari penelitian ini terlihat sudut pandang yang lain dalam implementasi kebijakan Pergub No. 22 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal dengan menggunakan pendekatan evaluatif untuk menganalisis implementasi dengan model digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan kurikulum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, model CIPP/O digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan ini.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dan belum pernah dilakukan. Penelitian ini menjadi penting karena studi yang mendalam dalam memahami konteks kebijakan pendidikan untuk kurikulum muatan lokal, bagaimana proses perumusan kurikulum muatan lokal, konten, struktur, latar belakang, tujuan, program-program, pelaksanaan

kurikulum muatan lokal, hingga faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2011.

Besar harapan penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dalam pengelolaan kurikulum era merdeka belajar pada tingkat SMK di Palangka Raya sehingga penelitian ini dapat mencapai harapan dan keinginan pemangku kepentingan dan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan pelaksanaan kurikulum muatan lokal di masa yang akan datang.

## 1.6 Roadmap Penelitian



Gambar 1. 6 Roadmap Penelitian

## 1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat kepada semua *stakeholder* dan pemangku kepentingan baik untuk peneliti pemerintah daerah, maupun untuk perguruan tinggi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, secara detail adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 4.7 Bersifat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan utamanya yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Muatan Lokal ;
- b. Untuk membuka kemungkinan tentang penelitian lebih lanjut khususnya Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. Untuk membuka kemungkinan adanya turunan dari Pergub (Perwali ataupun Perbub) serta adanya peraturan daerah tentang pendidikan berbasis kebudayaan untuk Provinsi Kalimantan Tengah,
- d. Untuk membuka kemungkinan mata pelajaran kurikulum muatan lokal di usulkan Pemerintah Daerah baik kota maupun Kabupaten untuk masuk dalam Dapodik ( menasionalkan kurikulum muatan lokal Kalimantan Tengah )

#### 4.8 Bersifat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan dan penerapan peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal provinsi kalimantan tengah serta peraturan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan pendidikan.

- b. Bagi DAD (Dewan Adat Dayak)

Penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk tetap mendorong pemerintah kota/ kabupaten melaksanakan dan menerapkan Peraturan Gubernur provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang tata cara kurikulum muatan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya bagi Siswa SMK di Kota Palangka Raya

- c. Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana monitoring dan evaluasi untuk dapat membantu mengembangkan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang kebijakan kurikulum muatan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah serta peraturan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan pendidikan.

- d. Bagi guru

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap guru muatan lokal dalam menjalankan kurikulum muatan lokal sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur